

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keuangan Negara dan pembangunan nasional tidak dapat dipisahkan dari keuangan daerah dan pembangunan daerah, bahkan dapat dikatakan pembangunan nasional identik dengan pembangunan daerah, karena pembangunan itu sendiri pada dasarnya dilaksanakan di daerah. Oleh karena itu perlu dilaksanakan penyerahan serta pengolahan dana pembangunan secara efektif dan efisien. Sejalan dengan pengolahan keuangan Negara, berbagai kebijakan yang telah di tempuh selalu diarahkan agar pembangunan di daerah agar dapat lebih meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan sekaligus meningkatkan perekonomian nasional. Pada hakekatnya pengolahan keuangan daerah berkaitan dengan pelaksanaan desentralisasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Dalam kerangka desentralisasi tersebut dibentuk daerah-daerah otonom dengan kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan daya guna penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam hal pelayanan bagi masyarakat dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Pergantian pemerintah dari orde baru kepada orde reformasi yang dimulai pada tahun 1998 menurut pelaksanaan ekonomi daerah yang memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional. Pemberian kewenangan ini telah diwujudkan

dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional dan perimbangan keuangan pusat dan daerah sesuai dengan prinsip demokrasi dan peran masyarakat. Secara konkrit pengaturan itu dilakukan dengan telah terbitnya Undang-undang nomor 33 tahun 2004 yang diperbarui dengan Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang nomor 25 tahun 1999 yang diperbarui dengan Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.

Konsekuensi dari pelaksanaan kedua Undang-undang tersebut adalah bahwa daerah harus mampu mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat dan lembaga swadaya masyarakat serta seluruh potensi masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Disisi lain, saat ini kemampuan keuangan beberapa Pemerintah daerah sangat tergantung pada penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, bersamaan dengan masih sulitnya pelaksanaan Negara dan otonomi daerah itu sendiri, maka setiap daerah dituntut harus dapat membiayai diri melalui sumber-sumber keuangan yang dikuasainya. Peranan Pemerintah Daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintah, pembangunan dan pelaksanaan masyarakat di daerah.

Kabupaten Ngawi, sebagai daerah otonom didalam wilayah propinsi Jawa Timur, diberi wewenang untuk menggali sumber dana yang ada sesuai dengan potensi dan keadaan daerah sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri untuk membiayai rumah tangganya sendiri, Sesuai dengan Undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Sumber-sumber pendapatan daerah yaitu sebagai berikut :

1. Pendapatan asli daerah (PAD) bersumber dari :
 - a. Pajak daerah
 - b. Retribusi daerah
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - d. Dan lain-lain PAD yang sah
2. Dana Perimbangan terdiri dari :
 - a. Dana Bagi Hasil
 - b. Dana alokasi Umum
 - c. Dana Alokasi Khusus
3. Lain-lain Pendapatan terdiri dari :
 - a. Pendapatan Hibah
 - b. Pendapatan Dana Darurat

Dari sekian pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri, Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang paling penting karena setiap tahunnya pajak daerah mampu memberikan sumbangan yang cukup besar bagi penerimaan daerah. Namun demikian, hingga saat ini rata-rata

penerimaan pajak diseluruh daerah di Indonesia masih relative kecil. Oleh karena itu reformasi pajak (*tax reform*), Perlu dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak pemerintah sekaligus terjadinya eksploitasi berlebih yang merugikan kepentingan principal (Wihana Kirana Jaya, 2007 : 121). *Tax reform* pajak pusat pertama di Indonesia telah dilaksanakan tahun 1983. Hal ini ditandai dengan diberlakukannya system pemungutan pajak dengan *self assessment system* dan ketentuan-ketentuan baru yang diberlakukan saat itu. pajak daerah bukan jenis pajak yang baru, melainkan telah lama ada di Indonesia, yakni sebagai sumber penerimaan pemerintah daerah dalam Anggaran Pendapatan Dan belanja Daerah (APBD).Sebelum dilakukan reformasi terhadap pajak daerah, cukup banyak jenis pajak yang dibuat oleh masing-masing daerah (Panca Kurniawan dan Agus Purwanto,2004 : 1).

Pajak daerah yang diterapkan oleh pemerintah daerah, baik yang ditentukan oleh Undang-undang pajak daerah maupun yang merupakan perluasan objek pajak pun juga beragam. namun, bila diteliti keadaannya masing-masing daerah belum mampu menunjukkan kinerjanya sebagai sumber penerimaan daerah melalui APBD maupun PAD. Dari peraturan pajak daerah yang ada beberapa diantara mempunyai biaya administrasi yang lebih tinggi dari pada hasilnya (*high cost of collection*), sehingga hasilnya tidak memadai. Juga adanya beberapa jenis pajak yang tidak memadai dipungut daerah, karena tumpang tindih dengan pajak yang lain, Menghambat alokasi sumber-sumber ekonomi yang lain, menghambat alokasi sumber ekonomi,bersifat tidak adil,atau tidak benar-benar bersifat pajak,tetapi

bersifat retribusi. Untuk itu agar pajak daerah lebih efektif dan efisien, maka pada tahun 1997 Pemerintah telah melakukan reformasi terhadap aturan pajak daerah dan retribusi yang ada sebelum untuk disesuaikan dengan perkembangan perekonomian nasional (Panca Kurniawan dan Agus Kuncoro, 2004:2).

Mengingat pentingnya pajak daerah sebagai salah satu sumber Penerimaan Asli Daerah (PAD), maka Pemerintah Kabupaten Ngawi harus berusaha mencapai target penerimaan pajak daerah yang telah ditetapkan dan meningkatkan pertumbuhan pemungutan pajak daerah untuk meningkatkan (PAD), yang digunakan untuk membiayai urusan rumah tangganya sendiri. target penerimaan pajak dapat diartikan sebagai prediksi penerimaan dari sektor pajak daerah yang akan dicapai dalam waktu tertentu (Rian adryana 2005,33). Sedangkan pertumbuhan yaitu mengukur bagian dari hasil yang didapatkan dan digunakan untuk menutup biaya pemungutan pajak yang bersangkutan dalam kurun waktu tertentu. Peningkatan produktifitas pertumbuhan, Pertumbuhan ekonomi modern terlihat dari sering meningkatnya laju produk perkapita terutama sebagai akibat adanya perbaikan kualitas input yang meningkatkan pertumbuhan atau produktifitas per unit input. Biaya pemungutan pajak jangan melebihi pemasukan dan dilihat juga pajak-pajak yang ditargetkan dengan realisasi terkumpulnya pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik mengambil judul “EVALUASI PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN NGAWI”.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah dapat dibuat perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat pencapaian target penerimaan pajak daerah di Kabupaten Ngawi?
2. Bagaimana tingkat pertumbuhan pemungutan pajak daerah di Kabupaten Ngawi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis tingkat pencapaian target penerimaan pajak daerah di Kabupaten Ngawi.
2. Untuk menganalisis tingkat pertumbuhan pemungutan pajak daerah di Kabupaten Ngawi.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Ngawi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi agar Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi dapat mengetahui besarnya tingkat pencapaian target penerimaan pajak daerah dan pertumbuhan pemungutan pajak daerah di Kabupaten Ngawi.

2. Bagi Penulis

Penelitian ini sebagai sarana untuk memperdalam dan menerapkan teori yang diperoleh kedalam praktek yang sesungguhnya. Serta

memberikan tambahan gambaran tentang pencapaian target penerimaan pajak daerah dan pertumbuhan pemungutan pajak daerah di Kabupaten Ngawi.

E. Pembatasan masalah

Karena banyaknya penerimaan asli daerah Kabupaten Ngawi maka penulis hanya membatasi masalah mengenai pelaksanaan pemungutan pajak daerah berupa pajak hotel, Pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan pajak pengambilan galian golongan C dari tahun 2007 sampai dengan 2009.

Untuk tolak ukur pencapaian target dibatasi hanya pada target dan realisasi penerimaan pajak. Tolak ukur pertumbuhan dibatasi hanya biaya langsung pemungutan, pajak kecocokan pajak daerah dan produktifitas petugas tidak diperhitungkan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN, terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pembatasan masalah, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI, dalam bab ini akan diuraikan tentang pengertian umum tentang pajak yang terdiri dari pengertian pajak pada

umumnya dan jenis pajak, pokok-pokok penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari pengertian Pemerintah di Daerah, dan sumber-sumber penerimaan daerah, tinjauan tentang pajak daerah yang terdiri pengertian pajak daerah dan dasar hukumnya, ruang lingkup pajak daerah, dan jenis-jenis pajak daerah, pencapaian target penerimaan pajak daerah, pertumbuhan dan pemungutan pajak serta tinjauan penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN, bab ini berisikan tentang objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data serta analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN, bab ini berisikan tentang gambaran umum Pemerintah Kabupaten Ngawi dan susunan organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKA) Kabupaten Ngawi serta analisis mengenai pencapaian target penerimaan pajak daerah dan pertumbuhan pemungutan pajak daerah di Kabupaten Ngawi.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN, bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan.